

## **PERAN LEMBAGA PENDIDIKAN DALAM PEMBINAAN BUDAYA BANGSA MENGHADAPI ERA PASAR BEBAS**

**Oleh:  
Suranto Aw.**

### **Abstrak**

Datangnya era pasar bebas, baik dalam kerangka Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA tahun 2003), maupun Asia Pasifik (APEC tahun 2020), di samping disambut dengan sikap optimis, ada pula kekhawatiran. Sikap optimis itu muncul karena era pasar bebas akan mempermudah peredaran barang, jasa dan informasi. Namun berbagai kemudahan yang tercipta, dikhawatirkan berdampak pada masyarakat, khususnya berkaitan dengan persoalan ketahanan budaya bangsa.

Untuk menghadapi pengaruh nilai-nilai budaya asing, lembaga pendidikan memiliki posisi peranan yang strategis, yakni sebagai wahana membina ketahanan budaya sehingga bangsa kita lebih siap memasuki era pasar bebas dimana interaksi budaya berlangsung pesat. Lembaga pendidikan membina sikap budaya yang positif bersamaan upaya membentuk manusia yang cerdas dan terampil. Upaya ini sesuai strategi pembangunan pendidikan yang bertujuan membentuk dan menciptakan sosok manusia Indonesia yang utuh. Jadi, orientasi keilmuan dan pembinaan budaya dilaksanakan seimbang. Pembinaan budaya dapat ditempuh dengan dua pendekatan, yakni monolitik dan integratif.

### **Pendahuluan**

Futurolog John Naisbitt dalam bukunya *Megatrends 2000*, ketika memandang kecenderungan yang akan terjadi di masa datang, antara lain mengatakan: "The most exciting breakthroughs of the 21st century will occur not because of technology but because of an expanding concept of what it means to be human". Makna dari pendapat tersebut, kurang lebih menunjukkan adanya praduga bahwa terobosan yang paling menarik memasuki abad 21 bukanlah perubahan yang terjadi karena teknologi, melainkan perubahan pandangan dan sikap masyarakat yang disebabkan oleh perluasan konsep tentang apa makna kemanusiaan.

Perluasan pandangan terhadap makna kemanusiaan akan menjadi daya pendorong gerakan baru untuk mencapai arti kehidupan manusia sesuai kodrat, harkat dan martabatnya. Dorongan ini begitu kuat, sehingga manusia senantiasa berusaha untuk membebaskan diri dari suasana yang mengekang dan menghalangi terpenuhinya kesejahteraan hidup. Keinginan terhadap suasana kebebasan dan keterbukaan terwujud dalam segala sendi kehidupan, atau dapat dikatakan berinteraksi dalam nilai-nilai budaya. Di dalam kehidupan ekonomi, keinginan akan kebebasan dan keterbukaan itu menampakkan bentuknya menjadi kesepakatan mewujudkan era perda-

gangan bebas atau liberalisasi perdagangan dengan berbagai organisasi pendukungnya, seperti WTO, NAFTA, APEC, AFTA, MEE dan sebagainya.

Permasalahannya adalah, bahwa di sela-sela begitu besarnya sikap optimis dalam menyambut era pasar bebas, baik dalam kerangka Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA tahun 2003), maupun Asia Pasifik (APEC, tahun 2020), ada pula kekhawatiran timbulnya masalah krusial di dalam bidang pendidikan di Indonesia, khususnya berkaitan dengan persoalan ketahanan budaya bangsa, di antaranya:

1. Apakah liberalisasi perdagangan ini bukan suatu penerangan faham liberalisme, suatu faham yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya Pancasila.
2. Dengan didukung teknologi komunikasi yang begitu canggih, dampak era perdagangan bebas tentu akan sangat kompleks. Manusia begitu mudah berhubungan dengan manusia lain di manapun di dunia ini. Berbagai barang dan informasi dengan berbagai tingkatan kualitas tersedia untuk dikonsumsi. Akibatnya akan mengubah pola pikir, sikap dan tingkah laku manusia. Hal seperti ini kemungkinan dapat mengakibatkan perubahan aspek kehidupan yang lain seperti hubungan kekeluargaan, kemasyarakatan, kebangsaan, atau secara umum berpengaruh pada sistem budaya bangsa. Di sinilah kembali muncul persoalan, bagaimana lembaga pendidikan mampu membina wawasan budaya sehingga bangsa kita dapat berkembang mengikuti tuntutan budaya zaman, namun tetap mampu menjaga nilai-nilai dasar dan nilai-nilai luhur sebagai kepribadian bangsa.

### **Maksud dan Implikasi Pasar Bebas**

Era pasar bebas, seringkali diasumsikan sebagai datangnya berbagai kemudahan untuk mendapatkan barang dan jasa, maupun keleluasaan memasarkan produk secara meluas tanpa terbatas oleh dinding batas wilayah geografis negara. Era pasar bebas identik dengan kemudahan, keterbukaan dan kebebasan.

Untuk dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas makna perdagangan bebas/liberalisasi perdagangan, ada baiknya terlebih dahulu kita mencoba memahami makna liberalisasi. Kata 'liberalisasi' berasal dari bahasa Prancis *libre* atau dalam bahasa Latin *libertas* yang artinya 'bebas'. Suprpto (1995:35) memberi batasan, liberalisme adalah suatu faham yang mendudukan individu sebagai pusat perhatian dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan kebebasan individu dijadikan titik tolaknya. Namun mengenai pengertian liberalisasi perdagangan, menurut Suprpto (1995:39) tidak ada kaitannya dengan faham liberalisme yang

individualistik. Perdagangan bebas merupakan tatanan sistem perdagangan dan investasi internasional yang berlangsung secara lebih terbuka melampaui batas-batas negara.

Orientasi kebebasan bukan berada pada tingkat individu, tetapi menjadi milik bersama yang harus dihormati oleh semua bangsa. Apabila kita berpikir secara agak filsafati, era pasar bebas sebenarnya sangat mensyaratkan keterikatan. Perdagangan bebas itu terlaksana apabila masing-masing negara merasa terikat oleh tanggungjawab dan komitmen yang telah disepakati. Hanya dengan kesadaran itulah, kiranya proses perdagangan benar-benar dapat berlangsung terbuka dan damai.

Dengan liberalisasi perdagangan ini, arus barang, jasa modal, dan tenaga kerja dengan mudah menembus batas-batas antar negara. Prosedur perdagangan antar negara yang semula berbelit-belit dan melelahkan, dengan datangnya era pasar bebas akan menjadi lebih sederhana. Dale dan Michelson (1986:258) mengatakan, di dalam suasana pasar global, manusia menjadi lebih mudah mendapatkan barang, jasa maupun informasi yang diperlukan, baik dari dalam negeri maupun dari manca negara.

Akan tetapi di samping kemudahan-kemudahan yang dijanjikan, ada satu kenyataan yang tidak dapat dibantah pula, bahwa era pasar bebas mengandung implikasi yang perlu diwaspadai. Ikatan Peminat dan Ahli Demografi Indonesia (Kompas, 21 November 1996, hal:17) sudah menyuarakan kekhawatiran terhadap implikasi era pasar bebas itu. Sejak jauh hari, lembaga ini sudah memberikan peringatan, jangan sampai penduduk Indonesia yang kini berjumlah 200 juta jiwa pada tahun 2003 hanya menjadi pasar empuk bagi negara lain di era perdagangan bebas dan globalisasi. Entah itu berupa barang buatan luar negeri, tenaga kerja asing yang mengisi berbagai jenis jabatan atau keahlian, maupun banjir informasi yang belum tentu sesuai dengan nilai-nilai yang ada di Indonesia.

Implikasi era pasar bebas dengan cepat juga akan merambah kehidupan politik dengan gerakan demokratisasi dan perjuangan hak azasi manusia. Tanpa sikap waspada yang memadai, sangat mungkin masyarakat akan mudah termakan isu-isu tidak bertanggung jawab yang berkedok demokrasi, HAM, dan kebebasan.

Begitu pula dilihat dari aspek kebudayaan, era pasar bebas akan menjadi media yang praktis bagi menyebarnya nilai-nilai budaya asing ke dalam wilayah negara kita. Terlebih lagi dengan didukung pesatnya kemajuan teknologi komunikasi, interaksi antarbudaya berjalan lebih lancar, serta kebudayaan asing secara deras akan mempengaruhi dan mencemari kebudayaan Indonesia.

Kondisi yang kita inginkan adalah agar interaksi antar budaya tetap menjaga hak semua manusia untuk dimanusiakan. Kita sama sekali tidak menginginkan adanya satu budaya tertentu yang terlalu dominan

mempengaruhi dan memaksakan/turut memberi warna budaya bangsa lain. Semua manusia memiliki pola kebudayaan, yang dimungkinkan saling berbeda apabila dibandingkan dengan manusia, masyarakat atau bangsa lain. Oleh karena itu, interaksi antar budaya sebagai implikasi laju pasar bebas, diharapkan dijiwai oleh kesadaran untuk memanusiakan manusia. Dick Hartoko (1981:1-2) menyatakan kebudayaan adalah suatu kegiatan kultural yang mempunyai sifat mengembangkan derajat kemanusiaan. Dengan demikian, sesuatu dikatakan a-kultural, tidak berbudaya, kalau sesuatu itu bersifat menghambat perkembangan derajat kemanusiaan, kalau sesuatu itu mengancam, apalagi kalau mematikan derajat kemanusiaan.

### Interaksi Antarbudaya

Kebudayaan Indonesia secara umum dapat dikatakan berkembang secara dinamis, dipengaruhi perkembangan kebudayaan daerah serta adanya interaksi dengan budaya manca negara. Selain terjadi kontak budaya antar suku, antar daerah, dan antar pulau di Indonesia sendiri, maka dalam kenyataannya berlangsung pula interaksi antara budaya Indonesia dengan budaya asing. Dengan datangnya era pasar bebas, sudah tentu budaya asing yang masuk ke negara kita semakin banyak.

Mengenai terjadinya kontak budaya antar daerah, tidak pernah kita anggap sebagai masalah yang merisaukan, bahkan kita melihatnya sebagai suatu proses yang memang diharapkan terjadi. Akan tetapi, berlangsungnya interaksi antar budaya secara internasional, seringkali menuntut suatu sikap waspada dan hati-hati. Koentjaraningrat (1981:65) mengingatkan bahwa suatu proses interaksi antar budaya tertentu menjadi media masuknya nilai-nilai budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai budaya masyarakat Indonesia.

Kita tentu menyadari, dengan era pasar bebas, proses kontak budaya akan semakin pesat. Dengan tersedianya sarana komunikasi massa sampai ke rumah-rumah penduduk, maka berarti tidak ada satu pun keluarga atau masyarakat yang mampu menutup diri. Padahal sesuai dengan peta jalur komunikasi internasional yang ada, negara-negara maju lebih mendominasi sebagai pemberi informasi, sedang negara-negara berkembang cenderung sebagai penerima. Proses komunikasi dikendalikan oleh negara-negara maju sehingga "globalisasi budaya" juga akan dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya yang berkembang di negara maju. Ada kesan bahwa globalisasi budaya merangsang kemungkinan terjadinya pemusatan sumber informasi secara sepihak.

Liberalisasi yang terasa cenderung satu arah itulah yang sangat dikhawatirkan akan dapat mengancam kepribadian dan kebudayaan bangsa dari negara berkembang. Mengapa? Bangsa di negara berkembang itu jauh

ketinggalan dalam memberikan informasi dan mengadakan komunikasi mengenai kebudayaan sendiri, dengan akibat sulit menangkal atau melunakkan pengaruh yang datang dari negara-negara maju.

Timbullah persoalan masa depan kebudayaan kita. Akankah kita membiarkan nilai-nilai budaya luhur yang kita agungkan begitu mudah terpuruk, terdesak budaya asing dan ditinggalkan oleh generasi mendatang? Tentu saja tidak, kita akan senantiasa berusaha melaksanakan pembinaan budaya bangsa. Tujuannya, untuk melestarikan nilai-nilai budaya bangsa yang luhur serta kemampuan menyerap nilai-nilai budaya dari luar yang positif dan yang diperlukan bagi pembaharuan proses pembangunan. Dalam interaksi antarbudaya, bangsa Indonesia harus mampu memberikan informasi ke luar, sebagai upaya memperkenalkan budaya Indonesia dan turut membangun peradaban global dunia. Dengan cara demikian, diharapkan kebudayaan Indonesia akan selalu tampil segar, tidak tertinggal perkembangan zaman, tetapi tidak terasing dari matriks kepribadian budaya sendiri yang didasari falsafah Pancasila.

### **Peran Lembaga Pendidikan dalam Pembinaan Budaya Bangsa**

Pembinaan budaya bangsa merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan dan kelangsungan kehidupan bangsa. Pembinaan budaya bangsa mempunyai tujuan untuk membentuk masyarakat Indonesia modern yang berdasarkan Pancasila, yaitu masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, baik lahiriah maupun batiniah, dengan anggota masyarakatnya yang bersifat takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, terampil, berbudi pekerti luhur dan berkepribadian Indonesia. Berbekal kondisi seperti ini, bangsa Indonesia diharapkan lebih mampu memasuki era baru, di mana interaksi budaya berlangsung secara pesat.

Untuk mencapai tujuan di atas, tidak dapat disangkal lagi, lembaga pendidikan di negara kita mempunyai peranan yang besar. Bangsa kita menyadari sepenuhnya bahwa keseluruhan proses perkembangan kebudayaan erat hubungannya dengan dunia pendidikan. Semua materi yang bernaung dalam suatu wadah kebudayaan, diperoleh dan dikembangkan secara sadar lewat proses belajar. Lewat proses belajar inilah diteruskan nilai-nilai budaya dari generasi yang satu kepada generasi selanjutnya. Lewat proses belajar, dimungkinkan nilai-nilai budaya luhur yang telah silam bereksistensi pada masa kini dan kebudayaan masa kini disampaikan ke masa yang akan datang.

Pada bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional, terdapat penekanan bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila di bidang pendidikan, maka pendidikan nasional mengusahakan pertama,

pembentukan manusia Pancasila sebagai manusia pembangunan yang tinggi kualitasnya dan mampu mandiri; kedua, pemberian dukungan bagi perkembangan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang terwujud dalam ketahanan nasional yang tangguh, yang mengandung makna terwujudnya kemampuan bangsa menangkal setiap ajaran, ideologi dan budaya yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa lembaga pendidikan memiliki posisi peranan yang strategis untuk melahirkan manusia yang ahli sekaligus berbudaya, karena lembaga pendidikan melaksanakan *transfer of knowledge* sekaligus *transfer of value*. Strategi pembangunan pendidikan bertujuan untuk membentuk dan menciptakan sosok manusia Indonesia yang utuh, di mana aspek lahiriah dan aspek batiniah berada dalam suatu keseimbangan yang bulat. Ini berarti lembaga pendidikan harus memegang teguh orientasi keilmuan dan orientasi budaya dalam satu keseimbangan yang integratif. Lembaga pendidikan bertanggungjawab mencipta manusia ahli yang bertakwa dan berbudaya.

Keterkaitan yang erat antara pendidikan dan penanganan masalah kebudayaan, disoroti oleh Fuad Hasan (1986:39) bahwa pendidikan sebagai upaya pengembangan sumber daya manusia dalam arti yang seluas-luasnya, dan kebudayaan sebagai milik seluruh bangsa adalah dua hal yang berkaitan erat. Pendidikan berlangsung dalam suatu iklim budaya, bahkan tidak terlepas dari matriks kebudayaan yang menjadi bumi persemajaan identitas bangsa. Sedang kebudayaan memerlukan usaha pelestarian melalui pendidikan yang menyadarkan kepentingan preservasi atau pelestarian nilai budaya yang turun-temurun. Pendidikan tanpa orientasi budaya akan menjadi gersang dari nilai-nilai luhur. Kebudayaan tanpa pendukung-pendukungnya yang sadar dan terdidik, pada akhirnya akan memudar sebagai sumber nilai dan menjadi silam dalam perjalanan sejarah.

Jelaslah bahwa untuk menghadapi era pasar bebas, pembinaan budaya bangsa yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan, bermaksud menghasilkan manusia Indonesia modern yang tidak tertinggal perkembangan zaman, tetapi tidak terasing dari matriks kebudayaannya sendiri, kebudayaan yang menghasilkan identitas bangsanya sendiri.

Apabila memang yang hendak kita hasilkan itu adalah manusia Indonesia yang berbudaya tinggi, maka mau tidak mau, lembaga pendidikan harus mampu memberikan wawasan positif kepada peserta didik dan masyarakat. Wawasan itu, dimaksudkan agar mereka mampu bersikap realistis terhadap nilai-nilai budaya tradisional. Sudah tentu tidak semua nilai tradisional harus dilestarikan. Sekiranya nilai-nilai tradisional itu sudah basi dan tidak relevan lagi dengan dinamika kemajuan zaman, seharusnya mereka tidak perlu merasa "berdosa" untuk menyingkirkan atau memodifikasikannya. Begitu pula terhadap nilai modern yang datang dari

luar, mereka perlu memiliki sikap antisipatif yang bijaksana. Nilai budaya asing yang memang sanggup memperkaya budaya, tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, bahkan relevan dengan gerak pembangunan, perlu diterima. Namun apabila nilai budaya asing itu diduga tidak mampu memberi dorongan positif atau bahkan menghambat, bertentangan dengan nilai-nilai budaya luhur bangsa tidak perlu diserap sebagai alternatif acuan pembaharuan pola budaya.

Interaksi antara nilai-nilai tradisional dengan nilai-nilai modern, menurut Astrid S. Susanto (1980:11) melahirkan tiga jenis masyarakat budaya, yaitu: (a) masyarakat yang berpegang kepada mitos; (b) masyarakat yang berpegang kepada apa yang dapat dibuktikan (ontologi); (c) masyarakat yang berpegang kepada apa yang relevan dan bermanfaat pada masa kini (fungsionalisme). Ditinjau dari segi ini, sudah tentu lembaga pendidikan kita ingin mencetak manusia yang mengutamakan hal-hal yang relevan dan bermanfaat, daripada mitos dan magi.

Persoalannya bukanlah tradisional atau modern, melainkan apakah nilai-nilai tersebut relevan dan bermanfaat ataukah tidak. Dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) disebutkan bahwa kebudayaan Indonesia yang berlandaskan Pancasila adalah perwujudan cipta, rasa, karsa, dan karya bangsa Indonesia, dan merupakan keseluruhan daya upaya manusia Indonesia untuk mengembangkan harkat dan martabat sebagai bangsa, serta diarahkan untuk memberikan wawasan dan makna pada pembangunan nasional dalam segenap bidang kehidupan bangsa. Dalam rangka pengembangan kebudayaan Indonesia, perlu ditambahkan kemampuan masyarakat untuk mengangkat nilai-nilai tradisional daerah yang luhur serta menyerap nilai-nilai dari luar negeri yang positif dan yang diperlukan bagi pembaharuan kebudayaan bangsa. (Bahan Penataran, 1993:152- 153).

Secara umum, pembinaan budaya bangsa melalui lembaga pendidikan dapat ditempuh dengan dua pendekatan, yakni pendekatan *monolitik* dan *integratif*. Ismail Arianto (1988:139-140) menjelaskan dua pendekatan itu, bahwa pendekatan monolitik ialah pendekatan yang didasarkan pada pemikiran bahwa setiap mata pelajaran merupakan sebuah komponen yang berdiri sendiri dan mempunyai tujuan tertentu dalam suatu kesatuan sistem. Wujud dari pendekatan ini, pembinaan budaya bangsa itu berlangsung dalam pelaksanaan kuliah Ilmu Budaya Dasar atau Antropologi Budaya sebagai mata kuliah yang berdiri sendiri.

Pendekatan integratif ialah memadukan atau menyatukan materi pembinaan kebudayaan ke dalam materi bidang studi atau mata pelajaran tertentu. Munculnya konsep integratif disebabkan oleh kurikulum di lembaga pendidikan kita sudah padat, sehingga sulit sekali menghadirkan mata pelajaran baru. Dengan keadaan ini, pembinaan budaya bangsa dapat

diintegrasikan dengan mata kuliah atau mata pelajaran lain yang relevan, misalnya Agama, Pancasila, Sosiologi, Sejarah dan sebagainya.

Lebih baik lagi apabila pendekatan yang ditempuh, baik monolitik maupun integratif, dilengkapi dengan kesadaran para pendidik untuk menjadikan norma-norma budaya luhur sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kurikulum pendidikan maupun dari kegiatan belajar-mengajar. Dengan cara demikian suatu proses belajar-mengajar di lembaga pendidikan akan menghasilkan peserta didik yang menguasai ilmu pengetahuan dan budaya (*kognitif*), mengekspresikan dalam sikap (*afektif*) dan mampu mewujudkan dalam karya nyata (*psiko motorik*). Peningkatan kecerdasan di bidang keilmuan harus sejajar dengan peningkatan di bidang lain seperti keagamaan, kebudayaan dan moral. Pengajaran keilmuan dan pendidikan budaya berpadu dalam ciri manusia Indonesia, ialah manusia yang tangguh menghadapi pengaruh nilai-nilai budaya manca negara yang sudah pasti akan terjadi begitu hebat pada era pasar bebas.

### **Kesimpulan**

Era pasar bebas akan membawa dampak positif dan negatif bagi kehidupan masyarakat, khususnya berkaitan dengan ketahanan budaya bangsa. Dampak positif akan kita rasakan, karena dalam suasana pasar global, manusia menjadi lebih mudah mendapatkan barang, jasa dan informasi yang diperlukan. Namun peredaran barang, jasa dan informasi yang begitu mudah menembus batas-batas negara, sangat potensial mengandung implikasi yang bersifat negatif. Era pasar bebas akan menjadi jembatan meningkatnya penyebaran nilai-nilai budaya asing ke dalam wilayah suatu negara. Kita tidak akan membiarkan nilai-nilai budaya luhur terdesak budaya asing dan ditinggalkan oleh generasi penerus. Kita perlu senantiasa melaksanakan pembinaan budaya bangsa, antara lain kita tempuh melalui lembaga pendidikan.

Lembaga pendidikan, di samping fungsinya sebagai wahana untuk melahirkan manusia-manusia Indonesia yang cerdas dan ahli, juga memiliki peranan penting dalam membina budaya bangsa. Terlebih lagi dalam rangka menghadapi era pasar bebas, lembaga pendidikan diharapkan mampu melaksanakan dua tugas tersebut secara seimbang. Tujuannya, selain peserta didik kelak memiliki kemampuan keilmuan untuk mendukung pembangunan, juga mampu melestarikan nilai-nilai budaya bangsa yang luhur serta menyerap nilai budaya dari luar yang relevan dengan pembangunan. Untuk membina budaya bangsa, lembaga pendidikan perlu: (1) memperkenalkan budaya bangsa yang luhur; (2) membina sikap realistis terhadap nilai budaya tradisional; (3) membina kemampuan menangkal nilai budaya yang tidak relevan dengan pembangunan dan bertentangan dengan



nilai-nilai Pancasila; (4) menyelaraskan dengan kurikulum pendidikan sehingga pembinaan budaya dapat ditempuh dengan dua alternatif pendekatan, yakni monolitik dan integratif.

Dengan cara demikian, kiranya lembaga pendidikan benar-benar mampu mengemban tugas sesuai amanat GBHN, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur, serta memungkinkan warga negara mengembangkan diri baik berkenaan dengan aspek lahiriah maupun rohaniah berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

#### **Daftar Pustaka**

- Astrid S. Susanto, Dr. Phil., 1980, **Komunikasi Sosial di Indonesia**, Binacipta, Bandung.
- Bahan Penataran P-4, 1995, **Garis-garis Besar Haluan Negara**, BP-7 Pusat, Jakarta
- Dale dan Michelon, 1986, **Metode-metode Managemen Modern**, 1986, Andalas Putra, Jakarta.
- Dick Hartoko, 1981, **Suatu Refleksi Baru tentang Hakekat Kebudayaan**, Unair, Surabata.
- Fuad Hassan, 1986, "Mendekatkan Anak Didik bukan Menjauhkannya", Prisma No. 2 TAHun XV, Jakarta.
- Ismail Arianto, 1988, **Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup di IKIP dan FKIP Buku Pegangan Mahasiswa**, Depdikbud., Jakarta.
- Koentjaraningrat, 1981, **Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan**, Gramedia, Jakarta.
- Sekretariat Kabinet RI, 1989, **Undang-undang RI Nomor 2 TAHun 1989 tentang Pendidikan Nasional**, Jakarta.
- Suprpto, M.Ed., 1995, **Pancasila sebagai Ideologi Terbuka dalam Menghadapi Liberalisasi Perdagangan Internasional**, BP-7 Pusat, Jakarta.
- Kompas, 21 November 1996.